



EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PANGAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

EVALUATION OF FOOD AID PROGRAM IN IMPROVING FOOD STABILITY AND REDUCING POVERTY IN INDONESIA

Nabila Sapitri¹, Naufal Zaky Wijaya², Adelio Hatta Arafat³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

E-mail : nabilasapitri672@gmail.com¹, nazay1204@gmail.com², adelioohatta@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 10-11-2025

Revised : 12-11-2025

Accepted : 14-11-2025

Pulished : 16-11-2025

Abstract

Poverty in Indonesia is multidimensional and highly sensitive to food price volatility, particularly rice. In the context of the pandemic and economic recovery in 2020–2024, the government strengthened the food aid architecture from in-kind assistance to e-vouchers (the Staple Food Program/BPNT) with support from trade (Bulog). This study aims to evaluate the contribution of food aid programs to food stability and poverty reduction, while assessing targeting accuracy, governance, and contextual factors that moderate impact. The methodology used is qualitative-descriptive with primary data sources through semi-structured interviews, limited FGDs, and participant observation of key informants (BPS central–provincial–district/city and field officers, Bulog, social services, facilitators, and KPM) in various regions of Indonesia. The analysis was conducted thematically with source–method triangulation; the 2020–2024 BPS indicator releases were used as supporting context, without shifting the primary focus on qualitative evidence. The results show: (i) poverty increased in 2020–2021 and then declined until 2024 along with recovery and strengthening of the safety net; (ii) e-vouchers expand choices and improve consumption quality (especially protein) and reduce transaction costs; (iii) synergy with PKH strengthens consumption resilience; (iv) key obstacles include inclusion–exclusion errors, the capacity of facilitators and e-warungs, commodity quality, and supply disruptions; and (v) rice price volatility can erode the real value of assistance without benefit indexation. Recommendations include dynamic targeting, indexation to food inflation, quality assurance and governance of e-warungs, nutrition education for food diversification, and integrated M&E that is adaptive to price cycles and shocks.

Keywords: *poverty, food aid, e-vouchers.*

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan sangat sensitif terhadap volatilitas harga pangan, terutama beras. Dalam konteks pandemi dan pemulihan ekonomi 2020–2024, pemerintah memperkuat arsitektur bantuan pangan dari natura menuju *e-voucher* (Program Sembako/BPNT) dengan dukungan tata-niaga (Bulog). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi program bantuan pangan terhadap stabilitas pangan dan pengurangan kemiskinan, sekaligus menilai ketepatan sasaran, tata kelola, serta faktor-faktor kontekstual yang memoderasi dampak. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif–deskriptif dengan sumber data primer melalui wawancara semi-terstruktur, FGD terbatas, dan observasi partisipatif terhadap informan kunci (BPS pusat–provinsi–kab/kota dan petugas lapangan, Bulog, dinas sosial, pendamping, dan KPM) di berbagai wilayah Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber–metode;



rilis indikator BPS 2020–2024 digunakan sebagai konteks pendamping, tanpa mengubah fokus utama pada bukti kualitatif. Hasil menunjukkan: (i) kemiskinan meningkat pada 2020–2021 lalu menurun hingga 2024 seiring pemulihan dan penguatan jaring pengaman; (ii) *e-voucher* memperluas pilihan dan meningkatkan kualitas konsumsi (terutama protein) serta menurunkan biaya transaksi; (iii) sinergi dengan PKH memperkuat ketahanan konsumsi; (iv) hambatan utama meliputi *inclusion–exclusion error*, kapasitas pendamping dan *e-warong*, mutu komoditas, serta gangguan pasok; dan (v) volatilitas harga beras dapat mengikis nilai riil bantuan tanpa indeksasi manfaat. Rekomendasi meliputi *dynamic targeting*, indeksasi terhadap inflasi pangan, penjaminan mutu dan tata kelola *e-warong*, edukasi gizi untuk diversifikasi pangan, serta M&E terintegrasi yang adaptif terhadap siklus harga dan guncangan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan, E-Voucher

PENDAHULUAN

Berbagai program bantuan pangan dirancang untuk menahan gejala kerentanan rumah tangga miskin terhadap fluktuasi harga, keterbatasan pendapatan, dan guncangan ekonomi namun efektivitasnya kerap diperdebatkan. Di Indonesia, urgensi evaluasi ini tidak hanya bertumpu pada angka kemiskinan, melainkan pada pemahaman kemiskinan sebagai fenomena multidimensi yang mencakup defisit akses layanan dasar dan peluang sosial-ekonomi, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menentukan kemampuan rumah tangga berpartisipasi secara produktif dalam Masyarakat (Greger, 2022) (Yadollahi et al., n.d.). Dalam horizon jangka menengah, kelompok rentan tetap besar sehingga intervensi yang menggabungkan kebijakan kemiskinan “tradisional” dan mekanisme manajemen risiko sosial menjadi krusial (Sumner & Edward, 2015). Selain itu, dinamika kemiskinan baik sementara maupun kronis seringkali lebih tinggi dari yang terlihat oleh indikator titik-waktu, sehingga penajaman sasaran wilayah dan kelompok sasaran menjadi kebutuhan epistemik dan kebijakan (Astuti et al., 2012). Latar belakang inilah yang menuntut penilaian sistematis atas rancangan, implementasi, dan dampak program bantuan pangan terhadap stabilitas pangan dan pengurangan kemiskinan.

Di sisi ketahanan pangan, evaluasi tidak boleh berhenti pada dimensi “stabilitas” pasokan; ia harus merangkum pilar ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas secara terpadu. Bukti daerah menunjukkan variasi antarwilayah: misalnya, Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menampilkan tantangan pada ketersediaan meski indikator aksesibilitas dan pemanfaatan relatif baik sebuah sinyal bahwa intervensi logistik dan produksi lokal perlu dikalibrasi bersama instrumen akses (Handini et al., 2025). Keterkaitan ketahanan pangan dengan status gizi memperjelas bahwa capaian nutrisi termasuk penurunan stunting bergantung pada desain program yang mengintegrasikan dimensi kesehatan dan gizi ke dalam rantai nilai pangan rumah tangga (Buulolo & Saragih, 2024). Dengan demikian, evaluasi program bantuan pangan perlu memeriksa “jalur kausal” dari ketersediaan menuju konsumsi bergizi dan kesehatan, bukan semata distribusi komoditas.

Volatilitas harga pangan terutama beras menjadi kanal transmisi penting dari ketidakstabilan pasar ke kemiskinan, dengan dampak yang umumnya lebih berat di pedesaan (Yusuf, 2014). Respons konsumsi rumah tangga Indonesia pun sensitif terhadap harga: seluruh kelompok makanan cenderung bersifat barang normal dan menunjukkan elastisitas harga sendiri yang negatif, sehingga kenaikan harga memicu penghematan konsumsi pada komoditas tertentu (Darma & Yuliana, 2024).



Dalam konteks ini, peran lembaga negara seperti Bulog menjadi strategis untuk penyanggaan pasokan dan stabilisasi harga, sekaligus memastikan distribusi yang adil; tetapi efektivitasnya mensyaratkan dukungan kebijakan yang konsisten dan komprehensif agar fungsi stabilisasi bekerja lintas siklus harga (Mitchell, 2022). Evaluasi program bantuan pangan karenanya perlu menautkan dampak langsung pada konsumsi rumah tangga dengan peran kebijakan harga dan tata-niaga sebagai prasyarat sistemik.

Secara internasional, bantuan pangan terbukti menjembatani kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dan produksi domestik, terutama di negara berpenghasilan rendah di Afrika Sub-Sahara sebuah pelajaran tentang fungsi penyangga ketika kapasitas produksi lokal belum memadai (Abdulai et al., 2004). Di Indonesia, program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) menunjukkan dampak gizi yang nyata: peningkatan asupan kalori rata-rata sebesar 368,4 Kkal/kapita/hari pada penerima, disertai kenaikan asupan makronutrien indikasi bahwa subsidi beras dapat memperbaiki kecukupan energi dan mutu diet kelompok rentan (Amrullah et al., 2023). Bukti-bukti ini memandu hipotesis evaluatif bahwa intervensi berbasis komoditas dapat efektif untuk sasaran spesifik (kalori dasar), namun mungkin memerlukan pelengkap kebijakan agar kualitas diet dan diversifikasi pangan juga membaik.

Evolusi desain kebijakan di Indonesia bergerak dari natura ke instrumen berbasis pasar. Transisi dari bantuan barang menuju sistem voucher seperti pada reformasi bantuan pangan menunjukkan perbaikan ketahanan pangan karena rumah tangga dapat memilih pangan dengan kualitas lebih baik (misalnya beras dan telur), meningkatkan konsumsi protein, dan bahkan menurunkan kemiskinan hingga 20% pada 15% rumah tangga termiskin menandai efek keterjangkauan dan kualitas yang substansial (Banerjee et al., 2021). Namun, efektivitas turut ditentukan ketepatan sasaran. Studi BPNT di Kecamatan Apela Satu menunjukkan masalah inclusion error (penerima mampu) dan exclusion error (kelompok layak terlewat), yang mengikis efisiensi anggaran dan keadilan program (Dilapanga & Mamonto, 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana serta bimbingan yang minim bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti terpetakan di Kecamatan Jahab menjadi hambatan implementasi yang memengaruhi capaian akhir (Manurun et al., 2025). Berlapis di atasnya, isu tata kelola dan variabilitas partisipasi warga turut menentukan apakah tujuan program selaras dengan kebutuhan setempat (Didi & Asmaddin, 2023).

Desain partisipatif kerap diusulkan untuk memperkuat akuntabilitas dan keberterimaan program. Pengalaman program Food Estate di Sumatera Utara mengilustrasikan pentingnya pelibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi; partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan relevansi intervensi dan memperlancar implementasi. Namun, keraguan publik terkait penggunaan lahan dan praktik budaya dapat membatasi keterlibatan, sehingga desain partisipasi perlu sensitif konteks dan disangga komunikasi risiko yang baik (Syahputra et al., 2023). Pada saat yang sama, keterbatasan SDM lokal dan kebutuhan bimbingan yang konsisten seperti dicatat di lapangan mengindikasikan pentingnya investasi kapasitas aparat dan pendamping untuk memastikan partisipasi bukan sekadar prosedur formal (Manurun et al., 2025) (Didi & Asmaddin, 2023). Dengan kata lain, arsitektur program mesti menginternalisasi partisipasi sebagai “mekanisme kerja”, bukan pelengkap administratif.



Bantuan pangan juga bekerja paling efektif ketika dirangkai dengan jaring pengaman sosial lainnya. PKH sebagai transfer tunai bersyarat terbukti menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, memperkuat sisi permintaan atas pangan dan layanan dasar (Kamarni & Putra, 2023). Lebih luas, paket jaring pengaman termasuk beras bersubsidi dan bentuk bantuan lain meningkatkan konsumsi dan mengurangi risiko jatuh miskin (Sumarto et al., 2005). Selama guncangan besar seperti pandemi COVID-19, bantuan sosial berperan mencegah kemunduran kesejahteraan yang tajam mendukung stabilitas konsumsi dan menjaga modal manusia (Samuda & Suprihartiningsih, 2023). Rangkaian bukti ini menegaskan bahwa evaluasi program bantuan pangan perlu menilai sinerginya dengan instrumen perlindungan sosial lain dan respons kebencanaan agar ketahanan rumah tangga terjaga lintas siklus krisis.

Faktor-faktor struktural turut memoderasi dampak program. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup berkorelasi dengan penurunan kemiskinan, menunjukkan bahwa akses layanan dasar memperkuat kemampuan rumah tangga memanfaatkan bantuan (Pardita et al., 2024) (Suryana & Swarniati, 2022). Di Sulawesi Tengah, pengurangan kemiskinan terkait perbaikan IPM menggarisbawahi pentingnya mengatasi kekurangan gizi dan menumbuhkan pendapatan untuk menaikkan kualitas pembangunan manusia (Rahmawati et al., 2024). Inklusi keuangan akses layanan dan literasi menurunkan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan peluang investasi yang lebih baik (Yeniwati et al., 2024), sementara praktik keuangan komunitas seperti ROSCA mendorong tabungan dan akses kredit yang menopang ketahanan ekonomi mikro (Wardhono & Nasir, 2022). Dinamika migrasi dan remitansi juga memengaruhi pola konsumsi: rumah tangga migran di Cilacap berbelanja lebih tinggi untuk pangan dan non-pangan, menandakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan ruang investasi modal manusia yang lebih luas (Kencana et al., 2024). Temuan-temuan ini memberi konteks bahwa dampak bantuan pangan tidak homogen ia dipengaruhi kualitas layanan publik, ekosistem keuangan, dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga (Suryana & Swarniati, 2022).

Bertolak dari telaah di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi dampak program bantuan pangan baik natura, voucher, maupun kombinasi dengan transfer tunai terhadap stabilitas pangan rumah tangga (akses, pemanfaatan, dan stabilitas konsumsi) dan kemiskinan (insiden, kedalaman, serta kerentanan); (2) menilai ketepatan sasaran dan efektivitas tata kelola, termasuk peran kelembagaan (misalnya Bulog) dalam stabilisasi harga dan distribusi; (3) menguji peran mediasi faktor struktural (IPM, inklusi keuangan, migrasi/remitansi) dalam memoderasi dampak; serta (4) mengidentifikasi desain partisipasi masyarakat yang meningkatkan keberterimaan program dan hasil gizi. Secara teoretik, penelitian berpijak pada kerangka perlindungan sosial dan kerentanan (yang melihat bantuan sebagai instrumen pengurangan risiko), ekonomi kesejahteraan (alokasi, distribusi, dan distorsi harga), serta ketahanan pangan empat pilar. Dengan menautkan bukti tentang kemiskinan multidimensi (Greger, 2022) (Yadollahi et al., n.d.). volatilitas harga dan peran tata-niaga (Yusuf, 2014) (Mitchell, 2022) (Darma & Yuliana, 2024), efektivitas desain program (Abdulai et al., 2004) (Amrullah et al., 2023) (Banerjee et al., 2021) (Dilapanga & Mamonto, 2023) (Manurun et al., 2025) (Didi & Asmaddin, 2023) (Syahputra et al., 2023), sinergi jaring pengaman (Sumarto et al., 2005) (Kamarni & Putra, 2023) (Samuda & Suprihartiningsih, 2023), dan determinan structural (Pardita et al., 2024) (Suryana & Swarniati, 2022) (Rahmawati et al., 2024) (Yeniwati et al., 2024) (Wardhono & Nasir, 2022) (Kencana et al., 2024), penelitian ini



diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual bagi peningkatan stabilitas pangan sekaligus pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi program bantuan pangan di Indonesia periode 2020–2024, dengan sumber data primer dari pemangku kepentingan BPS (pusat, provinsi, kabupaten/kota, petugas lapangan), pelaksana program, dan rumah tangga penerima. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan melalui purposive maximum variation yang diperkaya snowball agar heterogenitas wilayah dan tipologi kerentanan terekam secara memadai (Palinkas et al., 2015). Wawancara semi-terstruktur, FGD, dan observasi partisipatif menghasilkan thick description menjaga kedekatan dengan bahasa dan makna informan dalam tradisi qualitative description (Sandelowski, 2010). Etika mencakup persetujuan, kerahasiaan, anonimisasi; dokumen operasional dan rilis statistik BPS 2020–2024 digunakan sebagai konteks pendamping, tanpa mengubah fokus pada temuan kualitatif.

Analisis deskriptif menggunakan analisis tematik enam tahap familiarisasi, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan, penamaan/definisi, dan pelaporan untuk memetakan mekanisme dan pengalaman (Braun & Clarke, 2006). Jika perlu, qualitative content analysis induktif/deduktif menata kategori kebijakan dan praktik lapangan (Elo & Kyngäs, 2008). Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber–metode, audit trail, member checking, dan peer debriefing memenuhi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Carter et al., 2014) (Nowell et al., 2017) (Shenton, 2004). Pelaporan mencakup pedoman, rekaman, transkripsi verbatim, double-coding dengan rekonsiliasi, serta matriks tematik aktor dan wilayah; ringkasan indikator BPS dipakai sebagai konteks, bukan uji inferensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Ringkasan data (Indonesia, 2020–2024)

Tahun	Penduduk Miskin, Maret (P0, %)	Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Nilai Manfaat Program Sembako (Rp/bulan/KPM)*
2020	9,78	26,42	150.000
2021	10,14	27,54	150.000
2022	9,54	26,16	150.000
2023	9,36	25,90	200.000
2024	9,03	25,22	200.000

Catatan metodologis manfaat: Program Sembako merupakan pengembangan BPNT; besaran manfaat Rp150.000/bulan sejak 2020 (berdasarkan publikasi BPS “Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022”), dan dinyatakan BPS tetap Rp200.000/bulan pada 2023–2024. Sumber P0 & jumlah miskin: Berita Resmi Statistik (Maret) masing-masing tahun.

Interpretasi temuan

Secara agregat, kemiskinan meningkat pada 2020–2021 (dampak awal pandemi), kemudian menurun konsisten sampai Maret 2024 (9,03%; 25,22 juta orang). Tren penurunan ini terjadi bersamaan dengan penguatan program bantuan pangan: pergeseran skema dari beras in-kind (Raskin/Rastra) menuju voucher elektronik (BPNT/Sembako) yang berdasarkan uji acak berskala nasional meningkatkan akurasi penyaluran dan menurunkan kemiskinan hingga 20% pada 15%



rumah tangga termiskin (efek lokal/komparatif), serta memperbaiki kualitas konsumsi protein (telur/dll). Temuan tersebut sejalan dengan bukti evaluasi eksperimental program voucher di Indonesia.

Dari sisi ketahanan konsumsi, penelitian berbasis SUSENAS menunjukkan subsidi pangan (Raskin) meningkatkan asupan kalori dan makronutrien rumah tangga berpendapatan rendah ini memberi mekanisme yang masuk akal mengapa transisi ke voucher pangan berkorelasi dengan pemulihan pasca-pandemi. Namun literatur internasional juga mengingatkan potensi efek “wealth effect” pada subsidi harga yang bisa menurunkan kualitas gizi jika desainnya tidak tepat argumen untuk tetap menjaga targeting dan desain manfaat yang mendorong keragaman pangan.

Di sisi lain, volatilitas dan kenaikan harga beras terbukti sensitif terhadap kemiskinan di Indonesia—ketika harga beras naik, kemiskinan cenderung ikut naik, terutama di wilayah perkotaan. Ini menegaskan pentingnya kombinasi kebijakan: stabilisasi harga (peran BULOG/operasi pasar) sekaligus bantuan pangan yang tepat sasaran agar daya beli kelompok rentan terjaga.

Sebagai catatan, angka kemiskinan Maret digunakan untuk menjaga konsistensi deret waktu (2020–2024). BPS juga merilis pembaruan September 2024 (8,57%; 24,06 juta) yang mengindikasikan momentum penurunan berlanjut hingga paruh kedua 2024, meski angka tersebut tidak dimasukkan ke tabel agar seri Maret tetap sebanding antartahun.

Kerangka Teori. Evaluasi memadukan (i) teori ketahanan pangan empat pilar ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas untuk menilai jalur dari suplai hingga status gizi; (ii) kerangka perlindungan sosial/“social risk management” yang memandang bantuan sebagai instrumen peredam guncangan pendapatan dan harga; (iii) ekonomi kesejahteraan tentang targeting (inclusion–exclusion error), insentif, dan distorsi harga; serta (iv) *theory of change* program (input→proses→output→outcome gizi & kemiskinan). Desain berbasis komoditas (Raskin/Rastra) dan berbasis *voucher* (BPNT/Sembako) ditempatkan sebagai dua arsitektur dengan konsekuensi berbeda pada pilihan konsumen, kualitas pangan, harga lokal, dan biaya transaksi (Abdulai et al., 2004) (Banerjee et al., 2018) (Amrullah et al., 2023).

Pada 2020–2021 kemiskinan meningkat lalu turun berangsur hingga 2024 seiring pemulihan ekonomi dan penguatan jaring pengaman. Implementasi Sembako (e-voucher) memperluas pilihan pangan (mis. beras, telur) dan memudahkan pembayaran nontunai; namun heterogenitas antardaerah muncul pada kapasitas e-warong, kualitas komoditas, dan kontinuitas pasokan. Isu penargetan tetap krusial (keluarga mampu terdata sebagai penerima dan sebaliknya), sementara keterbatasan SDM pendamping serta tata kelola lokal memengaruhi kualitas layanan KPM. Stabilitas harga, khususnya beras, menjadi faktor pembatas utama manfaat riil; peran Bulog dalam operasi pasar penting, tetapi efektivitasnya bergantung koordinasi pasok, logistik, dan kebijakan harga. Sinergi dengan PKH terbukti memperkuat permintaan terhadap pangan bergizi, sedangkan variasi ketahanan pangan wilayah termasuk tantangan ketersediaan di beberapa provinsi menuntut penyesuaian desain lintas konteks (Yusuf, 2014) (Mitchell, 2022) (Handini et al., 2025) (Dilapanga & Mamonto, 2023) (Manurun et al., 2025) (Didi & Asmaddin, 2023) (Syahputra et al., 2023).

**Pengaruh Positif (mekanisme utama).**

1. Perbaikan konsumsi & gizi: Voucher meningkatkan akses terhadap pangan berprotein (telur) dan kualitas diet; subsidi beras menaikkan asupan kalori/makronutrien pada rumah tangga berpendapatan rendah (Banerjee et al., 2018)
2. Peredam guncangan harga/pendapatan: Bantuan menjaga konsumsi saat pandemi dan saat harga beras naik; mengurangi kedalaman/kerentanan kemiskinan (Sumarto et al., 2005)(Samuda & Suprihartiningsih, 2023) (Samuda & Suprihartiningsih, 2023) (Yusuf, 2014).
3. Efisiensi penyaluran & pilihan rumah tangga: E-voucher menurunkan biaya transaksi, memperbaiki akurasi dan *timeliness*, serta memberi otonomi pilihan (Banerjee et al., 2021).
4. Spillover kelembagaan: Integrasi dengan PKH dan literasi keuangan mendorong akses layanan keuangan dan perilaku konsumsi lebih terencana (Kamarni & Putra, 2023) (Yeniwati et al., 2024).
5. Pengaruh Negatif/risiko (yang perlu dimitigasi).
6. Kesalahan sasaran & tata kelola: *Inclusion exclusion error*, potensi *elite capture*, dan kualitas pendampingan yang tidak merata menurunkan efektivitas dan keadilan (Dilapanga & Mamonto, 2023) (Manurun et al., 2025) (Didi & Asmaddin, 2023).
7. Distorsi pasar & kualitas komoditas: Konsentrasi pemasok/e-warong, risiko *mark-up*, dan mutu barang yang tidak konsisten; jika manfaat tidak diindeks terhadap inflasi beras, nilai riil turun.
8. Ketergantungan & keragaman diet: Desain terlalu beras-sentris dapat mengurangi diversifikasi; tanpa *nudging* gizi, “efek kemakmuran” subsidi bisa tak otomatis meningkatkan kualitas diet (Jensen & Miller, 2011).
9. Kerentanan logistik: Gangguan pasok (cuaca, panen) melemahkan stabilitas; koordinasi Bulog daerah menentukan keberhasilan operasi pasar (Mitchell, 2022).

Perkuat *dynamic targeting* (pemutakhiran registri sosial), indeksasi manfaat terhadap inflasi beras, *quality assurance* e-warong, integrasi *nutrition education* dan diversifikasi pangan, kelola harga melalui cadangan pemerintah yang adaptif, serta M&E campuran (survei cepat dan audit ritel) untuk menangkap dampak gizi dan kesejahteraan secara real time (Banerjee et al., 2021) (Amrullah et al., 2023) (Warr & Yusuf, 2014) (Sumarto et al., 2005).

KESIMPULAN

Penelitian kualitatif deskriptif ini menyimpulkan bahwa program bantuan pangan berkontribusi nyata pada stabilitas pangan rumah tangga miskin sekaligus membantu menurunkan kemiskinan sepanjang 2020–2024. Secara makro, tren kemiskinan meningkat pada awal pandemi (2020–2021) lalu menurun kembali hingga Maret 2024, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan penguatan jaring pengaman. Di tingkat rumah tangga, pergeseran arsitektur kebijakan dari bantuan natura menuju *e-voucher* (Program Sembako/BPNT) memperluas pilihan komoditas, meningkatkan kualitas konsumsi (terutama protein), dan menurunkan biaya transaksi terutama bila diintegrasikan dengan program lain seperti PKH. Efek program paling kuat muncul ketika bantalan bantuan pangan berjalan beriringan dengan kebijakan stabilisasi harga, khususnya beras, sehingga daya beli kelompok rentan tetap terjaga saat terjadi guncangan.



Namun, efektivitas program belum merata antardaerah. Tantangan utama mencakup akurasi penargetan (inclusion–exclusion error), kapasitas sumber daya manusia pendamping dan pengelola *e-warong*, variasi kualitas komoditas dan kontinuitas pasok, serta tata kelola lokal yang tidak seragam. Volatilitas harga pangan mengikis nilai riil manfaat bila besaran bantuan tidak diindeks terhadap inflasi pangan. Dengan menimbang keempat pilar ketahanan pangan (ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas), hasil studi menunjukkan bahwa akses dan stabilitas relatif terbantu, tetapi pemanfaatan (mutu gizi) dan ketersediaan lokal masih memerlukan penguatan. Karena itu, perbaikan kunci meliputi *dynamic targeting* dan pemutakhiran registri, indeksasi manfaat terhadap inflasi beras, penjaminan mutu dan tata kelola *e-warong*, edukasi gizi untuk mendorong diversifikasi pangan, serta koordinasi yang lebih erat dengan instrumen penyangga harga (cadangan pemerintah/operasi pasar). Ke depan, sistem pemantauan evaluasi yang terintegrasi (audit ritel, *rapid survey*, dan jejak administrasi) serta uji coba desain manfaat yang adaptif terhadap siklus harga/iklim akan memperkuat dampak program secara berkelanjutan dalam menstabilkan pangan dan mengurangi kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulai, A., Abdulai, A., Barrett, C. B., & Hazell, P. B. R. (2004). Food aid for market development in sub-saharan africa. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.16170>
- Amrullah, E. R., Susilawati, P. N., Hidayah, I., Rusyiana, A., & Ishida, A. (2023). Do Food Price Subsidies Increase Nutritional Intake of Indonesian Households? *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*. <https://doi.org/10.18196/agraris.v9i2.172>
- Astuti, A. N., Asra, A., & Ilmma, A. (2012). *Poverty dynamics in indonesia, 2008–20101*. 3(2). <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/riebs/article/view/4/4>
- Banerjee, A., Hanna, R., Kyle, J., Olken, B. A., & Sumarto, S. (2018). Tangible Information and Citizen Empowerment: Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2), 451–491. <https://doi.org/10.1086/696226>
- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2021). Food vs. Food Stamps: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia. *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:28641>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bulolo, P. K., & Saragih, M. W. (2024). *Upaya Mengurangi Stunting Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan di Nias Selatan*. <https://doi.org/10.58466/literasi.v4i1.1341>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Darma, W., & Yuliana, R. (2024). Patterns, Determinants, and Elasticity of Household Food Consumption in Indonesia (Period 2021-2022). *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 16(2), 87–100. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v16i2.652>
- Didi, L., & Asmaddin, A. (2023). The Governance of Non-Cash Food Assistance Provision in Enhancing the Well-being of the Community in the City of Baubau. *Khazanah Sosial*. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i3.28061>
- Dilapanga, A. R., & Mamonto, F. H. (2023). The Implementation of Non-Cash Food Assistance



- Program (BPNT): A Case Study of Apela Satu Sub-District, Ranowulu District, Bitung City. *Technium Social Sciences Journal*, 45, 60–70. <https://doi.org/10.47577/tssj.v45i1.9112>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Greger, D. (2022). Poverty. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–2. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosp078.pub3>
- Handini, K. D., Ratmawati, R., & Emilia, E. (2025). Analisis Ketahanan Pangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024. *Pontianak Nutrition Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.30602/pnj.v8i1.1769>
- Jensen, R. T., & Miller, N. H. (2011). Do Consumer Price Subsidies Really Improve Nutrition? *The Review of Economics and Statistics*, 93(4), 1205–1223. https://doi.org/10.1162/REST_a_00118
- Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence from Districts/Cities in Indonesia on 2019. *Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 277–289. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126>
- Kencana, A. P., Rubiyanto, C. W., & Widadie, F. (2024). Food and Non-Food Consumption Patterns of Agricultural Migrant Households in Cilacap, Central Java, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 144, 4005. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414404005>
- Manurun, M. R., Arifin, H., Eryani, T. W. R., & Yani, A. (2025). Optimizing Non-Cash Food Assistance Programs through Analysis of Supporting Factors and Obstacles. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11787>
- Mitchell, C. A. (2022). Indonesia's Food Security Challenges: How Food SOE Optimizes its Role? *Research Horizon*, 2(3), 394–401. <https://doi.org/10.54518/rh.2.3.2022.394-401>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pardita, D. P. Y., Darma, I. K., Putra, I. K., & Purnami, A. A. S. (2024). Human Development and Poverty in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(08). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i8-08>
- Rahmawati, S., Kuncoro, M., Sading, Y., Lutfi, M., Jaya, A. H., & Fahlevi, M. (2024). The impact of poverty, malnutrition, and household income on human development in Central Sulawesi, Indonesia: A panel data analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd7854>
- Samuda, S. J. A., & Suprihartiningsih, E. (2023). COVID-19 Social Assistance Program and Poverty: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 125–134. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.19088>
- Sandelowski, M. (2010). What's in a Name? Qualitative Description Revisited. *Research in Nursing & Health*, 33(1), 77–84. <https://doi.org/10.1002/nur.20362>
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75. <https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>



- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2005). Assessing the Impact of Indonesian Social Safety Net Programmes on Household Welfare and Poverty Dynamics. *The European Journal of Development Research*, 17(1), 155–177. <https://doi.org/10.1080/09578810500066746>
- Sumner, A., & Edward, P. (2015). From Low Income, High Poverty to High-income, No Poverty? an Optimistic View of the Long-run Evolution of Poverty in Indonesia by International Poverty Lines, 1984–2030. *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/paper/unpwpaper/201310.htm>
- Suryana, S., & Swarniati, K. (2022). ERADICATING POVERTY AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN INDONESIA: An Approach with Multilevel Logistic Regression Model. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/welfare.2021.102-01>
- Syahputra, O. K. H., Siburian, J., & Anggraini, N. (2023). Mapping community participation in the food estate program of Ria-ria village, Pollung district, Humbang Hasundutan regency, North Sumatra province. *IOP Conference Series*, 1153(1), 12034. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1153/1/012034>
- Wardhono, A., & Nasir, M. A. (2022). Do Household Financial Behaviors affect Poverty in Indonesia?: Evidence from Indonesian Family Life Survey. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.17977/um002v14i12022p015>
- Warr, P., & Yusuf, A. A. (2014). World Food Prices and Poverty in Indonesia. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 58(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12015>
- Yadollahi, M., Jafari, M. A., Roohbakhsh, N., & Bakhtiary, M. (n.d.). *Poverty and the Measurements*. <https://doi.org/10.24200/jmas.vol2iss02pp52-58>
- Yeniwati, Y., Elfendri, E., & Bachtiar, N. (2024). Social Economic Analysis of Financial Inclusion and Poverty in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(12). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i12-09>
- Yusuf, A. A. (2014). Poverty, food prices and supply shocks of agricultural products in Indonesia. *Research Papers in Economics*. <https://ideas.repec.org/p/unp/sdgspp/201612.html>